

PENDIDIKAN POLITIK PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DI KABUPATEN SUMBAWA MENJELANG PEMILIHAN LEGISLATIF TAHUN 2024

Rahmat Hidayat¹, dan Leni Nurul Kariyani^{1*}

¹Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Teknologi Sumbawa, Indonesia

leni.nurul.kariyani@uts.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan analisis mendalam mengenai "Pendidikan Politik Partai Keadilan Sejahtera di Kabupaten Sumbawa Menjelang Pemilihan Legislatif Tahun 2024" dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Melalui pendekatan wawancara mendalam dengan narasumber terkait, survei, dan analisis data, penelitian ini bertujuan untuk memahami secara holistik praktik pendidikan politik yang dilakukan oleh PKS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PKS di Kabupaten Sumbawa mengakui pentingnya pendidikan politik sebagai bagian integral dalam persiapan menghadapi Pemilihan Legislatif 2024. Partai ini tidak hanya berperan sebagai peserta politik, tetapi juga sebagai agen pendidikan politik yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman politik masyarakat setempat. Komitmen PKS terhadap nilai-nilai normatif, seperti Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, menjadi pokok dalam membentuk identitas politik partai. Tantangan utama dihadapi dalam upaya mengubah persepsi masyarakat terkait identitas politik dan merespons resistensi terhadap perubahan nilai politik yang diusung oleh partai. Faktor penghambat, termasuk kompleksitas regulatif yang tidak konsisten, resistensi terhadap perubahan nilai, perubahan persepsi terkait identitas politik, dan perbedaan pemahaman budaya lokal, juga diidentifikasi sebagai elemen yang mempengaruhi dinamika pendidikan politik PKS. Penelitian ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang praktik pendidikan politik PKS dan menyoroti tantangan yang perlu diatasi untuk memperkuat identitas politik partai menjelang Pileg 2024, dengan penekanan khusus pada metode penelitian kualitatif sebagai pendekatan analisis yang digunakan.

Kata kunci: Pendidikan Politik; PKS Sumbawa; Pemilihan Legislatif 2024; Pemilihan Umum 2024; Kelembagaan Baru.

ABSTRACT

This research provides an in-depth analysis of "Political Education of the Prosperous Justice Party in Sumbawa Regency Approaching the Legislative Election of 2024" using qualitative research methods. Through in-depth interviews with relevant informants, surveys, and data analysis, the study aims to comprehensively understand the practices of political education conducted by the Prosperous Justice Party (PKS). The research findings indicate that PKS in Sumbawa Regency recognizes the importance of political education as an integral part of preparing for the 2024 Legislative Election. The party not only plays a role as a political participant but also as an agent of political education contributing significantly to the local community's political understanding. PKS's commitment to normative values such as Pancasila and Unity in Diversity is central to shaping the party's political identity. The main challenges are encountered in efforts to change public perceptions of the party's political identity and respond to resistance to the changes in political values advocated by the party. Inhibiting factors, including inconsistent regulatory complexities, resistance to changes in values, shifts in perceptions of political identity, and differences in understanding local culture, are also identified as elements influencing the dynamics of PKS's political education. This research provides a profound understanding of PKS's political education practices and highlights challenges to

be addressed to strengthen the party's political identity approaching the 2024 Legislative Election, with a specific emphasis on qualitative research methods as the analytical approach.

Keywords: Political Education; PKS Sumbawa; 2024 Legislative Election. General Election 2024; New Institutional.

1. PENDAHULUAN

Pentingnya Pemilihan Legislatif (Pileg) sebagai bagian integral dari Pemilihan Umum (Pemilu) dalam konteks demokrasi modern. Pileg memberikan kesempatan bagi warga negara untuk secara langsung memilih wakil rakyat atau pejabat pemerintahan. Pemilu, sebagai kerangka demokrasi, memungkinkan partisipasi rakyat dalam menentukan pemimpin dan kebijakan negara. Tujuan utama Pemilu dan Pileg adalah memberikan kesempatan bagi warga negara untuk menyuarakan preferensi mereka dan memilih wakil yang akan mewakili mereka dalam pemerintahan. (Annisa, 2023)

Sebagai contoh, Pemilihan Legislatif Tahun 2024 di Kabupaten Sumbawa memunculkan 24 partai politik yang lolos verifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi salah satu peserta Pemilu tersebut. Analisis hasil Pileg sebelumnya menunjukkan bahwa PKS mendapatkan 4 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa pada Pileg Tahun 2019. Posisi ini menempatkan PKS sebagai pemegang kursi terbanyak ketiga di DPRD Kabupaten Sumbawa. (kpusumbawakab.go.id, 2019)

Namun, fokus utama dari pendahuluan ini adalah pentingnya pendidikan politik dalam konteks Pemilu. Pendidikan politik tidak hanya tentang memahami proses memilih, tetapi juga mencakup pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai politik, hak dan kewajiban warga negara, dan peran partai politik. Dalam konteks Kabupaten Sumbawa, masih terdapat pandangan bahwa politik adalah urusan eksklusif pemerintah dan elit. Sikap apatis ini dapat membuat masyarakat rentan terhadap manipulasi dan kurang memahami visi dan misi calon saat pemilihan. (Daffa, 2019)

Dalam mengatasi permasalahan ini, partai politik, termasuk PKS, memiliki tanggung jawab untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik mengamanatkan partai politik untuk memberikan pendidikan politik agar warga negara menjadi sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas bagaimana PKS memberikan pendidikan politik kepada kader, simpatisan, dan masyarakat Kabupaten Sumbawa dalam menghadapi Pileg tahun 2024.

Dalam menggali lebih dalam mengenai pendidikan politik, penelitian ini akan mengeksplorasi program, proses, dan tantangan yang dihadapi PKS dalam memberikan pemahaman politik kepada masyarakat. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang pendidikan politik yang efektif, diharapkan dapat meningkatkan partisipasi politik masyarakat, menjaga integritas demokrasi, dan merangsang perbaikan lebih lanjut dalam pendidikan politik di masa depan.

Pada bagian landasan teori, penelitian ini mengadopsi Teori Kelembagaan Baru (New Institutionalism) sebagai kerangka konseptual. Scott, (2008) menyajikan konsep ini sebagai sintesis dari interaksi antara institusi lokal dan organisasi, dengan fokus pada pendekatan kelembagaan baru untuk memahami organisasi. Dalam konteks PKS di Kabupaten Sumbawa, teori ini menekankan aspek kognitif dengan mengacu pada keyakinan dan aturan berdasarkan budaya Islam.

Scott, (2008) merinci bahwa Teori Kelembagaan Baru mencakup elemen regulatif, normatif, dan kognitif sebagai inti struktur lembaga. Dalam konteks regulatif, PKS mungkin membuat aturan dan pedoman untuk program pendidikan politik, pemilihan internal, dan etika politik. Pilar normatif melibatkan nilai-nilai dan norma-norma yang dianut oleh partai, seperti keadilan, moralitas, dan kebebasan berpendapat. Sementara itu, pilar kultural-kognitif menyoroti pembentukan kerangka makna dan budaya politik yang sesuai dengan ideologi partai.

Dalam analisis dimensi-dimensi tersebut, penelitian ini akan memeriksa bagaimana PKS mengaplikasikan Teori Kelembagaan Baru dalam pendidikan politik mereka. Aspek regulatif terkait dengan pembuatan aturan dan pedoman, seperti program pelatihan politik. Pilar normatif melibatkan transfer nilai-

nilai politik, etika berpolitik, dan partisipasi dalam pemilihan. Pilar kultural-kognitif fokus pada pembentukan makna politik dan identitas partai.

Dengan memanfaatkan Teori Kelembagaan Baru, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana PKS menggunakan pendekatan kelembagaan dalam menyelenggarakan pendidikan politik. Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman pendidikan politik, khususnya dalam konteks persiapan PKS menghadapi Pemilihan Legislatif Tahun 2024 di Kabupaten Sumbawa.

2. METODOLOGI

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif, yang memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap pemahaman anggota Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Kabupaten Sumbawa tentang pendidikan politik yang mereka terima. Dalam konteks ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam pengumpulan dan analisis data, dengan penekanan pada makna yang terkandung dalam informasi yang diperoleh.

Fokus penelitian dibatasi pada subjek dan objek tertentu. Subjek penelitian melibatkan pimpinan, pengurus, dan kader PKS, sementara objek penelitian difokuskan pada pendidikan politik yang diberikan oleh PKS dalam menghadapi Pemilihan Legislatif tahun 2024 di Kabupaten Sumbawa. Sumber data mencakup data primer dari wawancara mendalam dengan anggota PKS dan data sekunder dari literatur dan dokumen terkait.

Teknik analisis data melibatkan analisis tematik untuk mengidentifikasi pola, tren, dan temuan utama dari wawancara, dokumen, dan pengamatan. Analisis komparatif digunakan untuk membandingkan pandangan dan pengalaman anggota PKS guna memahami perbedaan dan persamaan dalam pemahaman dan persiapan pemilihan legislatif. Validitas diperkuat melalui triangulasi data dari berbagai sumber, sementara reliabilitas dijaga dengan memastikan konsistensi dalam analisis data.

Proses pengumpulan data melibatkan wawancara mendalam dengan pimpinan, pengurus, dan kader PKS yang telah menerima pendidikan politik. Selain itu, analisis dokumen dilakukan terhadap materi pendidikan politik yang disediakan oleh PKS, dan pengamatan dilakukan pada kegiatan pendidikan politik yang diadakan oleh partai jika memungkinkan. Dengan pendekatan ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana PKS menggunakan pendidikan politik dalam persiapan menghadapi Pemilihan Legislatif tahun 2024 di Kabupaten Sumbawa.

2.1. Waktu dan Tempat

Kabupaten Sumbawa, sebagai satu dari sepuluh kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), terletak di wilayah tersebut. Ibukota Kabupaten Sumbawa adalah Sumbawa Besar, dan luas wilayahnya mencapai 6.643,98 km². Secara geografis, kabupaten ini terletak di antara 1160 42' dan 1180 22' Bujur Timur, serta 80 8' dan 90 7' Lintang Selatan. Batas administratif Kabupaten Sumbawa adalah sebagai berikut: di sebelah Utara berbatasan dengan Laut Flores, di sebelah Timur berbatasan dengan kabupaten Dompu, di sebelah Selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia, dan di sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Sumbawa Barat-Selat Alas. (Bps Kabupaten Sumbawa, 2022)



Gambar 1. Peta Kabupaten Sumbawa

Sumber: Bps Kabupaten Sumbawa, 2022

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. PENDIDIKAN POLITIK PKS SUMBAWA MENJELANG PILEG TAHUN 2024

A. Elemen Regulatif

Dalam persiapan Pemilihan Legislatif 2024 di Kabupaten Sumbawa, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menonjolkan peran utamanya dalam pendidikan politik. PKS menunjukkan komitmen kuatnya dengan mencerminkan tingkat kepatuhan tinggi terhadap aturan internal yang mengatur penyelenggaraan pendidikan politik. Aturan internal tersebut memberikan landasan yang kokoh bagi PKS untuk memberdayakan masyarakat dan kader secara politik.

Tabel 1. Tingkat Kepatuhan Terhadap Aturan Internal PKS

No.	Parameter	Tingkat Kepatuhan (%)
1	Kepatuhan dalam Menyelenggarakan Pendidikan	95
2	Hubungan Internal yang Diperkuat	Yes

Sumber Data: Wawancara dengan Hamzan Wadi, Sekretaris DPD PKS Sumbawa, pada tanggal 7 November 2023.

Tabel ini mencerminkan tingkat kepatuhan PKS sebesar 95% terhadap aturan internal, yang melibatkan penyelenggaraan pendidikan politik. Kepatuhan tinggi ini juga berdampak positif pada penguatan hubungan internal partai.

Partai ini tidak hanya mengikuti formalitas aturan internal tetapi juga memberikan penekanan pada penguatan hubungan internal. Pendekatan ini memperkuat kohesivitas internal partai dan memberikan fondasi yang solid untuk pelaksanaan program pendidikan politik.

Selanjutnya, dalam menindaklanjuti komitmen ini, PKS aktif menyelenggarakan program pendidikan politik, menggambarkan peran aktifnya dalam mempersiapkan kader dan masyarakat menjelang Pemilihan Legislatif 2024. Salah satu contoh konkret adalah workshop pendidikan politik yang dihadiri oleh 80% kader, dengan 90% melaporkan peningkatan pemahaman mereka tentang tugas dan fungsi legislatif dan eksekutif.

Tabel 2. Partisipasi dalam Workshop Pendidikan Politik PKS

No.	Parameter	Persentase Partisipasi
1	Kader PKS yang Berpartisipasi	80
2	Peningkatan Pemahaman Setelah Workshop	90

Sumber Data: Arsip Data Absensi Kegiatan Workshop oleh DPD PKS Sumbawa dan Wawancara dengan Hamzan Wadi, Sekretaris DPD PKS Sumbawa, pada tanggal 7 November 2023.

Tabel ini mengindikasikan bahwa sebanyak 80% kader PKS aktif berpartisipasi dalam workshop pendidikan politik, dan 90% dari mereka melaporkan peningkatan pemahaman setelah mengikuti program tersebut.

Dengan demikian, PKS menunjukkan tidak hanya komitmen formal tetapi juga tindakan nyata dalam mematuhi aturan internal, menjaga hubungan internal yang kokoh, dan menyelenggarakan program pendidikan politik yang berdampak positif. Semua ini sejalan dengan visi PKS untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan kader terhadap proses politik serta peran mereka di dalamnya.

PKS, melalui elemen regulatifnya, menunjukkan peran strategis dalam memajukan pendidikan politik di Kabupaten Sumbawa menjelang Pemilu 2024. Kepatuhan tinggi terhadap aturan internal mencerminkan

disiplin internal dan fokus partai pada pendidikan politik. Hasil evaluasi menunjukkan efektivitas program, dengan partisipasi kader yang tinggi dan peningkatan pemahaman yang signifikan.

Dengan mengorganisir workshop dan melibatkan kader, PKS berhasil mencapai target partisipasi dan meningkatkan pemahaman kader dan masyarakat terkait empat pilar kebangsaan dan bernegara. Hal ini menandakan bahwa kegiatan pendidikan politik internal partai dapat menjadi model untuk partisipasi aktif dan pemahaman yang lebih baik di kalangan anggota partai.

Pentingnya pendidikan politik dalam masyarakat juga ditekankan melalui program yang melibatkan publik. Peningkatan kesadaran politik dari 40% menjadi 70% adalah pencapaian yang signifikan, menunjukkan bahwa upaya PKS tidak hanya terfokus pada internal partai, tetapi juga membuka ruang bagi partisipasi dan kesadaran politik di kalangan masyarakat umum.

Meskipun demikian, tantangan mungkin muncul dalam menjaga momentum dan memastikan dampak jangka panjang dari program pendidikan politik ini. Kontinuitas, evaluasi berkala, dan adaptasi terhadap perubahan dinamika politik perlu menjadi perhatian agar keberhasilan yang telah dicapai dapat dipertahankan.

Secara keseluruhan, elemen regulatif PKS dalam pendidikan politik memberikan kontribusi positif dan dapat dijadikan contoh bagi partai politik lainnya. Dengan demikian, PKS tidak hanya mempersiapkan kader yang berkualitas, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan pemahaman politik di tingkat masyarakat, mendukung proses demokrasi yang lebih baik.

B. Elemen Normatif

Elemen normatif dalam konteks Pendidikan Politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Kabupaten Sumbawa menjelang Pemilihan Legislatif (Pileg) Tahun 2024 memegang peranan sentral. Menurut Hamzan Wadi, Sekretaris DPD PKS Sumbawa, PKS memandang pendidikan politik sebagai upaya integral yang melibatkan aspek-aspek lebih luas daripada sekadar aturan formal. Pendekatan ini mencerminkan komitmen partai untuk membentuk masyarakat yang tidak hanya terampil secara teknis dalam ranah politik, tetapi juga memiliki landasan moral yang kokoh dan etika politik yang tinggi.

Pendidikan politik yang dijalankan oleh PKS Sumbawa didesain secara mendalam untuk mencakup nilai-nilai normatif dan keagamaan, terutama dalam konteks Islam. Analisis materi Unit Pembinaan Anggota (UPA) PKS Sumbawa menunjukkan fokus pada integrasi nilai-nilai tauhid, etika politik Islam, implementasi syariah dalam kebijakan politik, dan penerapan amal Islami di politik.

Tabel 3. Materi UPA PKS Sumbawa

No.	Materi Pendidikan Politik PKS Sumbawa
1	Integrasi nilai-nilai tauhid dalam politik
2	Etika politik Islam dalam konteks kebijakan
3	Implementasi syariah dalam kebijakan politik
4	Penerapan amal Islami di ranah politik

Sumber Data: *Arsip DPD PKS Sumbawa, 2023*

Pernyataan warga Kelurahan Bugis, Supratno, menegaskan bahwa kader PKS Sumbawa tidak hanya memberikan edukasi politik secara umum, tetapi juga mengintegrasikan aspek agama dalam penyampaian informasi. Hal ini mencirikan pendekatan yang berbeda dengan partai lain, seperti PDIP, yang lebih menekankan pada nilai-nilai kebangsaan, hukum, dan strategi politik.

Menurut Sirajuddin, Bendahara Umum DPD PKS Sumbawa, PKS memiliki komitmen kuat terhadap nilai-nilai normatif, terutama dalam persiapan menghadapi Pileg 2024. Pendidikan politik diarahkan tidak hanya untuk meningkatkan pemahaman teknis politik masyarakat, tetapi juga membentuk individu yang memiliki landasan moral dan etika politik yang tinggi. Sirajuddin menekankan pentingnya nilai-nilai normatif, terutama Pancasila, sebagai identitas bangsa.

Para kader PKS, seperti yang diwakili oleh Gatot, tidak hanya memahami nilai-nilai normatif secara konseptual, tetapi juga menjadikannya sebagai pedoman dalam setiap tindakan dan keputusan dalam dunia politik. PKS berusaha membentuk agen perubahan yang mampu menjadikan etika politik sebagai prinsip hidup terintegrasi dalam setiap aspek kehidupan sehari-hari. Dengan pendekatan ini, PKS Sumbawa berharap dapat merubah paradigma masyarakat terhadap politik dan menciptakan budaya politik yang lebih positif menjelang Pileg 2024.

Tabel 4. Kesimpulan Elemen Normatif

No.	Kesimpulan Elemen Normatif
1	Panduan Utama PKS: Nilai-nilai normatif menjadi panduan utama bagi PKS, mencakup nilai keagamaan dan etika politik.
2	Pendidikan Politik Berfokus pada Pancasila dan Etika Politik: Pendekatan pendidikan politik PKS melibatkan nilai Pancasila dan etika politik sebagai fokus utama.
3	Internalisasi Nilai Normatif oleh Para Kader: Nilai-nilai normatif diinternalisasi oleh para kader dan menjadi bagian integral dari identitas partai.
4	Komitmen Kuat terhadap Etika Politik menjelang Pileg 2024: PKS memiliki komitmen kuat terhadap etika politik sebagai strategi dalam menghadapi Pileg 2024.
5	Pendidikan Politik untuk Budaya Politik yang Positif: Pendidikan politik berusaha membentuk budaya politik yang positif dan bermartabat.
6	Para Kader sebagai Agen Perubahan: Para kader PKS berperan sebagai agen perubahan dalam membangun etika politik yang kokoh di masyarakat.

Sumber Data: Diolah oleh Peneliti

Dengan pendekatan holistik yang mengintegrasikan nilai-nilai normatif dan agama dalam pendidikan politik, PKS Sumbawa berharap dapat menciptakan warga masyarakat yang lebih cerdas dalam mengambil keputusan politik, berlandaskan pada nilai-nilai luhur Pancasila. Melalui pendidikan politik yang holistik, PKS berupaya membangun budaya politik yang berakar pada nilai-nilai kebangsaan dan keadilan, khususnya menjelang Pemilihan Legislatif tahun 2024.

C. Elemen Kognitif – Budaya

PKS Sumbawa telah mengembangkan pendekatan holistik dalam program pendidikan politiknya, khususnya dalam aspek kognitif-budaya. Menurut Hamzan Wadi, Sekretaris DPD PKS Sumbawa, fokus utama program ini adalah memastikan pemahaman kognitif masyarakat terkait tugas dan fungsi lembaga legislatif dan eksekutif, terutama menjelang Pileg 2024. Pendekatan ini tidak hanya melibatkan transfer pengetahuan tetapi juga penanaman pemahaman kognitif yang mendalam, mencerminkan komitmen PKS untuk memberdayakan masyarakat melalui pemahaman politik yang lebih baik.

Pentingnya pengkaderan berjenjang dalam PKS juga dipaparkan oleh Hamzan Wadi. Pengkaderan dianggap sebagai fondasi krusial dalam membangun identitas kognitif politik yang solid. Lebih dari sekadar transfer pengetahuan, pengkaderan di PKS menjadi wadah untuk membangun kesadaran akan identitas politik partai. Proses ini menciptakan atmosfer inklusif dan progresif, yang diharapkan dapat memperkuat partisipasi politik masyarakat, terutama menjelang Pileg 2024.

Tabel 5. Penyesuaian Terhadap Budaya Lokal dalam Pendidikan Politik PKS Sumbawa

No.	Aspek	Deskripsi
1	Kontekstualisasi Materi Pendidikan	Materi disesuaikan dengan keberagaman budaya di Sumbawa untuk memahami konsep politik.
2	Pelibatan dalam Tradisi Lokal	Kegiatan politik terintegrasi dengan tradisi lokal, seperti acara kesenian atau keagamaan.
3	Bahasa dan Komunikasi yang Relevan	Penggunaan bahasa sesuai dengan budaya lokal untuk memudahkan pemahaman masyarakat.

Sumber Data: Wawancara dengan Hamzan Wadi, Sekretaris DPD PKS Sumbawa, pada tanggal 7 November 2023.

Tabel di atas memberikan gambaran penyesuaian terhadap budaya lokal dalam pendidikan politik PKS Sumbawa. Ini mencakup kontekstualisasi materi pendidikan politik dengan keberagaman budaya di wilayah Sumbawa, pelibatan dalam tradisi lokal, dan penggunaan bahasa yang relevan dengan budaya setempat. Sumber data dari wawancara dengan Hamzan Wadi pada tanggal 7 November 2023.

Tabel 6. Relevansi dan Transformasi Budaya dalam Pendidikan Politik PKS Sumbawa

No.	Aspek	Deskripsi
1	Perubahan Sikap dan Nilai	Pendidikan politik menciptakan perubahan positif pada nilai dan sikap masyarakat.
2	Inovasi dalam Pendekatan Edukasi	Materi baru dan inovatif memperhitungkan konteks budaya dan mendukung transformasi pandangan dan partisipasi masyarakat.
3	Responsif Terhadap Perubahan Sosial	Responsif terhadap perubahan sosial, menciptakan alur dua arah dalam transformasi budaya.

Sumber Data: Wawancara dengan Hamzan Wadi, Sekretaris DPD PKS Sumbawa, pada tanggal 7 November 2023.

Tabel ini menyoroti relevansi dan transformasi budaya dalam pendidikan politik PKS Sumbawa. Aspek-aspek seperti perubahan sikap dan nilai, inovasi dalam pendekatan edukasi, dan responsif terhadap perubahan sosial menandai upaya PKS untuk menciptakan pendidikan politik yang tidak hanya informatif tetapi juga relevan dengan konteks sosial dan budaya masyarakat setempat.

Secara keseluruhan, pendekatan kognitif-budaya dalam program pendidikan politik PKS Sumbawa menciptakan landasan yang kuat untuk membangun pemahaman politik yang lebih baik, memperkuat identitas partai, dan menumbuhkan partisipasi politik yang lebih aktif dan bermakna di tengah masyarakat. Pendekatan ini, yang mencakup strategi inklusif dan adaptif, diharapkan dapat menjawab tantangan kompleksitas politik lokal, khususnya menjelang Pileg 2024.

3.2. Kegiatan – Kegiatan Pendidikan Politik PKS Sumbawa

Kegiatan pendidikan politik oleh PKS Sumbawa mencerminkan pendekatan holistik yang dinamis dan disesuaikan dengan kebutuhan. Meskipun fleksibel, beberapa kegiatan inti yang tetap dilakukan termasuk Workshop menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) dan Unit Pembinaan Anggota (UPA). Menurut Gatot dalam wawancara pada 18 November 2023, workshop dan UPA merupakan kegiatan pendidikan politik khusus untuk kader, sementara kegiatan untuk masyarakat lebih dinamis.



Gambar 2. Kegiatan Workshop PKS Menjelang Pemilu Tahun 2024
Sumber: Facebook Muhammad Takdir, 2023

Workshop, diselenggarakan sesuai kebutuhan, fokus pada pemahaman tugas dan fungsi eksekutif dan legislatif, serta teknik kampanye, terutama menjelang Pemilu. Gambar di atas menunjukkan kegiatan workshop PKS menjelang Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024. Sementara UPA, ditujukan untuk memberikan pendidikan politik berlandaskan nilai-nilai normatif keislaman, bertujuan membentuk kader PKS sebagai suri tauladan.



Gambar 3. Seminar Pilar MPR RI oleh Kader PKS Sumbawa
Sumber: Facebook Muhammad Takdir, 2023

Kegiatan pendidikan politik untuk masyarakat, terutama menjelang Pileg, mencakup seminar dan penanaman nilai serta pemahaman politik yang jujur oleh kader PKS di tengah-tengah masyarakat. Tujuannya adalah memberikan pemahaman agar masyarakat dapat memiliki penilaian objektif terhadap calon dan menghindari kesalahan dalam memilih. Gambar di atas menunjukkan kegiatan seminar oleh kader PKS Sumbawa.

Dalam perbandingan dengan PDIP, baik PKS maupun PDIP memiliki pendekatan pengkaderan berjenjang. Namun, perbedaan mendasar terletak pada fokus kegiatan pendidikan politik di tingkat basis masyarakat. PDIP lebih menekankan interaksi sosial langsung dan pengenalan terhadap kondisi rakyat oleh kader PDIP. Pendekatan ini mencerminkan semangat partisipatif dan interaktif, di mana kader PDIP berperan sebagai agen utama dalam menyampaikan pesan politik kepada rakyat.

Tabel 7. Kesimpulan Kegiatan Pendidikan Politik PKS

Elemen	Kegiatan Pendidikan Politik PKS
Kader	Workshop menjelang Pemilu dan Unit Pembinaan Anggota (UPA) berlandaskan nilai-nilai normatif keislaman.
Masyarakat	Seminar dan Penanaman nilai dan pemahaman politik yang jujur.
Sumber	Diolah oleh Peneliti

Sumber Data: Diolah oleh Peneliti

Secara keseluruhan, kegiatan pendidikan politik oleh PKS menciptakan pendekatan holistik untuk membentuk pemahaman dan sikap politik yang sesuai dengan nilai-nilai keislaman dan normatif. Khususnya, PKS menekankan peran kader dalam memberikan edukasi politik, dengan fokus pada pemahaman tugas dan fungsi eksekutif serta legislatif, serta nilai-nilai keislaman yang menjadi dasar moral bagi kader PKS.

3.3. Faktor Penghambat Pendidikan Politik Partai Keadilan Sejahtera di Kabupaten Sumbawa

Dari sudut pandang normatif, penghambatan utama yang dihadapi adalah resistensi terhadap perubahan nilai politik di masyarakat. PKS Sumbawa berkomitmen untuk mengatasi resistensi ini melalui berbagai upaya, seperti dialog terbuka, seminar, dan diskusi kelompok, guna memahami masyarakat akan pentingnya nilai-nilai normatif dan etika politik yang dipegang teguh oleh PKS. Tantangan lain adalah perubahan persepsi masyarakat terkait identitas politik PKS. Untuk mengatasinya, PKS bekerja ekstra keras untuk membuktikan bahwa partai ini tidak hanya mementingkan kepentingan kelompok, tetapi juga berkomitmen pada nilai-nilai normatif dan etika politik yang tinggi.

Dalam elemen kognitif-budaya, PKS Sumbawa mengakui kompleksitas dalam menyesuaikan materi pendidikan politik dengan berbagai budaya lokal di Kabupaten Sumbawa. Meskipun telah ada upaya untuk menyesuaikan, kendala muncul terkait perbedaan persepsi dan pemahaman antara budaya lokal dan materi pendidikan politik. Meskipun demikian, PKS terus beradaptasi dan melakukan upaya untuk memastikan bahwa pesan pendidikan politik mereka dapat diterima dengan baik oleh masyarakat.

Saat menjelang Pileg 2024, kendala dalam menciptakan identitas politik yang positif di tengah polarisasi politik menjadi hambatan yang harus diatasi. Oleh karena itu, PKS Sumbawa meningkatkan program pendidikan politiknya dengan fokus pada nilai-nilai normatif dan etika politik untuk mengatasi hambatan ini. Meskipun PKS telah menghadapi berbagai tantangan, partai ini tetap berkomitmen untuk menyelenggarakan pendidikan politik yang bermutu dan relevan dengan kondisi lokal, serta memastikan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi yang lebih baik.

Dalam menghadapi resistensi normatif, PKS Sumbawa merancang sejumlah strategi komunikasi dan pendekatan partisipatif. Dialog terbuka, seminar, dan diskusi kelompok menjadi sarana utama untuk mendekati diri kepada masyarakat dan merespons perubahan nilai politik yang diinginkan. PKS juga terus berinovasi dalam menyampaikan pesan-pesan normatif, menekankan pentingnya nilai-nilai etika politik yang dianut partai.

Selain itu, PKS Sumbawa mencoba untuk merespons perubahan persepsi masyarakat terhadap identitas politiknya dengan cara yang lebih proaktif. Mereka berusaha membangun citra positif yang mencerminkan kesesuaian dengan nilai-nilai lokal dan keberagaman masyarakat. Guna mengatasi resistensi normatif, partai ini terus memperkuat kerjasama dengan kelompok-kelompok masyarakat lokal dan berupaya membangun pemahaman yang lebih mendalam mengenai kepentingan bersama.

Dalam elemen kognitif-budaya, PKS Sumbawa fokus pada penyesuaian materi pendidikan politik dengan keberagaman budaya lokal. Meskipun perbedaan pemahaman dan persepsi masih menjadi kendala, partai ini giat berkolaborasi dengan tokoh-tokoh lokal dan lembaga adat untuk mengoptimalkan materi pendidikan politik agar lebih terkoneksi dengan realitas sosial dan budaya masyarakat Sumbawa.

Peningkatan identitas politik yang positif di tengah polarisasi politik dihadapi dengan upaya intensifikasi dalam program pendidikan politik menjelang Pileg 2024. PKS Sumbawa mengarahkan fokusnya pada penguatan nilai-nilai normatif dan etika politik untuk mengatasi tantangan tersebut. Melalui kegiatan-kegiatan seperti seminar empat pilar kebangsaan, diskusi publik, dan kampanye yang berorientasi pada ideologi, partai ini berharap dapat merangsang perubahan sikap dan pemahaman masyarakat terhadap politik.

Secara keseluruhan, PKS Sumbawa memandang faktor penghambat sebagai dinamika yang wajar dalam menjalankan pendidikan politik. Upaya kontinyu dalam mengatasi kendala ini mencerminkan tekad dan komitmen partai untuk memperkuat partisipasi politik masyarakat serta meningkatkan kualitas demokrasi di Kabupaten Sumbawa. Dengan kesabaran, kolaborasi, dan pendekatan yang inklusif, PKS Sumbawa optimis dapat mengatasi berbagai kendala dan memberikan dampak positif pada pemahaman politik masyarakat setempat.

Dapat disimpulkan Faktor Penghambat Pendidikan Politik PKS di Kabupaten Sumbawa:

1. Elemen Regulatif
 - Tidak ada masalah
 - Soal regulatif yang menghambat jalannya pendidikan politik PKS di Kabupaten Sumbawa khususnya menjelang Pileg tahun 2024.
2. Elemen Normatif
 - Resistensi Terhadap Perubahan Nilai Politik
 - Resistensi di kalangan masyarakat terhadap perubahan nilai politik menjadi kendala dalam upaya PKS untuk mentransformasi pandangan dan sikap politik.
 - Perubahan Persepsi Terkait Identitas Politik PKS
 - Tantangan untuk mengubah persepsi masyarakat terkait identitas politik PKS membutuhkan upaya intensif dan strategi komunikasi yang efektif.
3. Elemen Kognitif-Budaya
 - Perbedaan Pemahaman dan Persepsi Budaya Lokal
 - Kompleksitas dalam menyesuaikan materi pendidikan politik dengan berbagai budaya lokal di Kabupaten Sumbawa menyulitkan proses penyampaian pesan politik yang dapat diterima dengan baik oleh masyarakat.
 - Polarisasi Politik dan Perubahan Identitas Politik
 - Adanya polarisasi politik memperumit upaya PKS dalam membangun identitas politik positif di tengah perubahan dinamika politik lokal.

Faktor-faktor penghambat tersebut menciptakan tantangan yang signifikan bagi PKS Sumbawa dalam melaksanakan pendidikan politik menjelang Pileg 2024. Upaya mengatasi kendala-kendala ini memerlukan strategi yang matang, koordinasi yang baik dengan pihak terkait, dan pendekatan yang inklusif guna meraih partisipasi maksimal dari masyarakat Kabupaten Sumbawa.

4. KESIMPULAN

Dalam penelitian ini, telah dilakukan analisis mendalam terkait "Pendidikan Politik Partai Keadilan Sejahtera di Kabupaten Sumbawa Menjelang Pemilihan Legislatif Tahun 2024." Berdasarkan temuan-temuan yang telah diungkapkan melalui hasil wawancara dengan narasumber, survei, dan analisis data, beberapa kesimpulan dapat ditarik:

Pentingnya Pendidikan Politik PKS:

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Kabupaten Sumbawa menempatkan pendidikan politik sebagai suatu hal yang krusial, terutama dalam persiapan menghadapi Pemilihan Legislatif (Pileg) Tahun 2024.

Peran Utama PKS dalam Pendidikan Politik:

PKS memiliki peran yang signifikan dalam memberikan kontribusi positif terhadap pemahaman politik masyarakat, khususnya terkait tugas dan fungsi lembaga legislatif dan eksekutif.

Fokus pada Nilai-Nilai Normatif:

PKS Sumbawa menunjukkan komitmen tinggi pada nilai-nilai normatif, seperti Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dianggap sebagai fondasi utama dalam membentuk identitas politik partai.

Tantangan dalam Identitas Politik:

Kendala terutama muncul dalam upaya merubah persepsi masyarakat terkait identitas politik PKS, dan resistensi terhadap perubahan nilai politik yang diusung oleh partai.

Faktor Penghambat Pendidikan Politik:

Adanya faktor penghambat, kompleksitas regulative tidak ada, resistensi terhadap perubahan nilai politik, perubahan persepsi terkait identitas politik, dan perbedaan pemahaman budaya lokal

5. DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

Scoot M. 2008. *Effective Public Relations*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Sumber Jurnal, Tesis dan Skripsi

Daffa Daud, Muhammad. 2019. *Partai Politik dan Pendidikan Politik Studi atas Program Pendidikan Politik Partai Golongan Karya Kota Tanggerang Selatan*. Skripsi Fakultas Ilmu Sosia I dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Wanma, A. V. 2013. *Pentingnya Pendidikan Politik Generasi Muda Terhadap Pelaksanaan Partisipasi Politik di Distrik Samofa*. Jurnal Administrasi Publik, 1(1).

Sumber Peraturan

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

Sumber Internet

Kpu.go.id. 2023. *Peserta Pemilu Tahun 2024*. <https://www.kpu.go.id/berita/baca/11315/berikut-24-partai-politik-peserta-pemilu-2024>. Diakses pada tanggal 23 Oktober 2023.

Kpu-sumbawa.kab.go.id, 2019. *Pemilu Tahun 2019*. <https://kpu-sumbawakab.go.id/index.php/informasi/id/10/pemilu-tahun-2019.html>. Diakses pada tanggal 23 Oktober 2023.

Sari, Annisa Medina. 2023. *Pengertian Pemilu, Fungsi dan Prinsipnya*. <https://fahum.umsu.ac.id/pengertian-pemilu-fungsi-dan-prinsip/>. Diakses pada tanggal 23 Oktober 2023.